

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan kajian dalam penelitian ini akan di cantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti diantaranya, yaitu:

1. Gilang Galuh Pangaribowo (2023) Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung. Dalam penelitian yang berjudul : **“Implementasi Kebijakan Desa Digital Dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)”**. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Implementasi kebijakan Desa digital dalam pelayanan publik di Desa Podomoro :1) Komunikasi kurang berhasil disebabkan kurangnya kejelasan informasi masyarakat dalam menggunakan fitur-fitur Desa digital. 2) Sumber daya ketidakmampuan masyarakat Desa Podomoro dalam melaksanakan program Desa digital. 3) Disposisi Aparatur Desa Podomoro sudah mengetahui dan memahami fungsi dari website Desa digital. 4) Struktur Birokrasi tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Desa digital. Maka, kesimpulan pada penelitian ini dapat dinyatakan kurang berhasil menerapkan nilai implementasi kebijakan.
2. Linda Afriani (2024) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Dalam penelitian yang berjudul : **“Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Pada Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”**. Sistem informasi publik adalah

platform digital untuk mengelola informasi kepada masyarakat secara luas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan pemerintah desa menerapkan sistem informasi desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem informasi publik berbasis website pada Desa Rimba Makmur dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat implementasi sistem informasi publik berbasis website pada Desa Rimba Makmur. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Rimba Makmur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Dan di analisis dari teori Edward III, dengan empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi publik berbasis website pada Desa Rimba Makmur telah dilakukan dengan cukup baik, meskipun belum optimal. Beberapa hambatan yang ditemui dalam penerapan website desa antara lain kurangnya sosialisasi dan koordinasi terkait implementasi website desa kepada masyarakat, sumber daya manusia yang rendah baik secara kualitas maupun kuantitas, minimnya informasi yang disediakan diwebsite desa serta tidak ada insentif yang diberikan dalam mengelola website desa.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah satu konsep utama dalam ilmu administrasi publik yang terus mengalami perkembangan kajian hingga saat ini. Secara umum, kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kajian mengenai kebijakan publik tidak pernah kehilangan relevansinya karena persoalan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah terus berkembang seiring perubahan zaman.

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut. Menurut Fredrich dalam Agustino, (2022:15) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud.

Pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014:8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”.

Anderson dalam Agustino (2022:16) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu

yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut Abdul Wahab (2005) dalam Ida Syafriyani (2023:1), Kebijakan adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang di arahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Kebijakan publik oleh (Anggara dalam Dian Suluh Kusuma Dewi, 2014) diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pelayanan memiliki tiga makna, (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang; (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan pemerintah

yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan masalah publik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2. Implementasi

a. Pengertian

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Dalam Kamus besar *webster to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical affect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Menurut (Sahya Anggara, dalam wahab 2014: 232).

Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Menurut Mulyadi (2016:12) menyatakan bahwa: “Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan”

Grindle (Mulyadi, 2016:47), menyatakan "implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu".

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Dalam arti luas, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepeentingan (stakeholders), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang di gerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.

Berdasarkan definisi yang disampaikan para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan dapat memperoleh hasil sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan tersebut.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut pandangan Edwards III (dalam Leo Agustino, 2022:154-158) menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi, menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau perntasmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas yaitu:
 - a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
 - b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
 - c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, mka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.
2. Sumber daya, merupakan hal penting lainnya, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
 - a) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam

mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b) Informasi; informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksana kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
 - c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi,, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
 - d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
3. Disposisi, disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, adalah:
- a) Efek disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
 - b) Melakukan pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*), implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukkan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan

kompetensinya. Selain itu pengaturan birokrasi juga bermuara pada ‘pembentukan’ sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil.

- c) Insentif; salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.
- 4. Struktur birokrasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah:
 - a) Membuat *Standard Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
 - b) Melaksanakan Fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Teori model implementasi kebijakan menurut Thomas B. Smith (dalam Affrian, 2023) yang mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan terdiri dari 4 (empat) komponen, yakni:

- a. Kebijakan yang diinginkan. Adalah pola-pola interaksi yang diinginkan oleh mereka yang telah mendefinisikan kebijakan.
- b. Kelompok sasaran. Adalah mereka yang diminta oleh kebijakan untuk mengadopsi pola-pola interaksi baru. Mereka adalah orang-orang yang paling banyak terkena dampak kebijakan.
- c. Organisasi pelaksana. Adalah unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.

- d. Faktor-faktor lingkungan. Unsur-unsur atau komponen yang ada di lingkungan yang berpengaruh terhadap atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan.

3. Website Desa

a. Pengertian Website

Website merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan untuk menyampaikan dan memperoleh informasi melalui jaringan internet. Website terdiri dari halaman-halaman yang saling terhubung dan dapat memuat berbagai bentuk informasi, seperti teks, gambar, dokumen, maupun informasi lainnya yang dapat diakses oleh pengguna. Dalam perkembangannya, website tidak hanya digunakan oleh individu atau organisasi, tetapi juga dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dalam pemerintahan, website dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Penggunaan website memungkinkan pemerintah menyampaikan informasi secara lebih luas dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tanpa harus datang secara langsung ke kantor pemerintahan. Oleh karena itu, website dapat menjadi salah satu sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa website merupakan media berbasis internet yang digunakan untuk

menyampaikan dan menyediakan berbagai informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara lebih mudah dan luas.

b. Pengertian website desa

Website desa merupakan website yang digunakan oleh pemerintah desa sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai desa kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan melalui website desa dapat berupa profil desa, berita dan kegiatan desa, pembangunan desa, potensi desa, dokumentasi kegiatan, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Rahayu dan Aji (2019), website desa merupakan salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan sebagai media informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui website, pemerintah desa dapat menyampaikan berbagai informasi mengenai kegiatan dan kondisi desa kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi melalui media yang dapat diakses secara daring. Website desa pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sebuah situs internet, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah desa mengelola informasi yang terdapat di dalamnya. Pengelolaan tersebut mencakup penyediaan informasi, pembaruan informasi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa website desa merupakan media berbasis internet yang dikelola oleh

pemerintah desa untuk menyediakan dan menyampaikan berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan, dan kondisi desa kepada masyarakat.

4. Informasi Publik

a. Pengertian Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi publik memiliki peran penting dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan yang dilakukan oleh badan publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik pada dasarnya merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. Keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tingkat pemerintahan desa, informasi publik dapat berkaitan dengan berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan desa, pembangunan, profil desa, serta informasi lain yang perlu diketahui masyarakat.

b. Website Desa sebagai media informasi publik

Website desa dapat digunakan sebagai salah satu media informasi publik karena memiliki fungsi untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Melalui website, pemerintah desa dapat menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat tanpa terbatas pada penyampaian informasi secara langsung di kantor desa.

Menurut Rahayu dan Aji (2019), pemanfaatan website desa sebagai media informasi publik dapat mendukung keterbukaan informasi dalam pemerintahan desa. Website dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan pemerintahan dan kondisi desa sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah desa.

Penggunaan website sebagai media informasi publik juga membutuhkan pengelolaan yang baik. Informasi yang disampaikan harus jelas, lengkap, dan diperbarui sesuai dengan kondisi terbaru. Selain itu, diperlukan aparatur yang bertanggung jawab dalam mengelola website serta pembagian tugas yang jelas agar penyampaian informasi dapat dilakukan secara berkelanjutan.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah bagian dari suatu alur pemikiran seseorang terhadap apa yang sedang dipahaminya untuk dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti secara logis dan sistematis. Kerangka berpikir pada penelitian ini berkaitan dengan beberapa aspek

Implementasi Website Desa Sebagai Media Informasi Publik di Desa Sungai Namang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan Undang-undang tentang Desa No 6 Tahun 2014, Pasal 86 dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 241 tentang Sistem Informasi Desa

Teori yang peneliti gunakan yaitu pada Implementasi Kebijakan Menurut Teori Metode Implementasi Kebijakan George Edward III (Leo Agustino 2022:154) yaitu sebagai berikut bahwa proses implementasi kebijakan terdiri dari 4 (empat) komponen.

1. Komunikasi.
2. Sumber daya.
3. Disposisi.
4. Struktur Birokrasi



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

